



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RIKO PORWANTO**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **401188**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.443.312.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 469 m2/110 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/220 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 520.600.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
4. Tanah Seluas 75370.2 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 3.768.512.500
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 13770 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 68.850.000
7. Tanah Seluas 29000 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
8. Tanah Seluas 36.07 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 180.350.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 132.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI SKYWAVE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 114.000.000



3. MOTOR, BEAT OTOMATIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 347.503.609

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.970.216.109

III. HUTANG Rp. 109.850.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.860.366.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.